

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA
TERHADAP KINERJA APARATUR
PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA DINAS SOSIAL PROVINSI
JAWA BARAT)**

Oleh:

Febrina Astria Verasvera

Magister Manajemen-Universitas Katolik Parahyangan

Abstract: This research was conducted at Dinas Sosial of West Java Province, located on Jalan Raya Cibabat No. 331 Cimahi, West Java. This research tries to analyze whether there is influence of budget based on performance toward the improvement of local government officials performance. The variable X research indicators (Budgeting Based on Performance), they are: preparation, ratification, implementation, evaluation and reporting. While for the variable Y (Performance of Local Government Apparatus) these are: effectiveness, efficiency, employee growth, and customer satisfaction. The method used in this research is descriptive analysis method with a case study approach, and hypothesis testing used Rank Spearman correlation analysis in order to find out the correlation variable X (Budgeting based on Performance) and Variable Y (Performance of Local Government Apparatus). Whereas for knowing how much the influence of variable X toward variable Y, by using the coefficient of determination. Based on the results of research for the data obtained, it can be concluded that, budgeting based on performance has significant effect on the performance of local government apparatus in the Dinas Sosial of West Java Province. It is shown in the results of Spearman Rank correlation of $r_s = 0.6956$ and the interval from 0.60 — 0.79 which shows a strong association level, as well as the results of testing the hypothesis that the results show that $t_{hitung} 7.1150 > t_{tabel} 1.6707$. That matter make an indication of rejection of H_0 which indicates that there is a positive relationship between the variables X with variables Y and for the coefficient of determination that shows the much influence of budgeting based on performance toward the performance of local government apparatus which obtained yield is 48.39% while 51.61% influenced by other factors. So that expected that all officials in the Dinas Sosial able to implement the budgeting based on performance more better.

Keywords: budget, performance.

PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah berakibat pada terjadinya dinamika perkembangan dan perbaikan sistem keuangan serta akuntansi di pemerintahan daerah menuju pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Dinamika perkembangan tersebut ditunjukkan dengan adanya regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, seperti Undang-Undang (UU) 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU no. 32 dan 33 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, serta beberapa Undang-undang maupun aturan-aturan lain yang memang menjadi regulasi terhadap berbagai pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Keadaan tersebut mendorong perkembangan praktek dan teori pada bidang akuntansi sektor publik menjadi begitu pesat.

Pengelolaan keuangan dalam pembangunan baik di tingkat pusat ataupun tingkat daerah merupakan kunci penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Namun dalam hal ini sering terdapat masalah yang dapat menghambat lajunya pembangunan, tetapi seperti yang kita ketahui hambatan justru sering dialami oleh daerah, apalagi daerah-daerah yang kurang potensial, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya.

Hambatan-hambatan dalam hal keuangan mulai sangat terasa pada saat terjadi penurunan penerimaan negara akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan yang berdampak pula pada penurunan pemberian subsidi dan pembiayaan proyek-proyek pemerintah di daerah oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, suatu daerah harus mampu menggali sumber-sumber potensi daerahnya untuk dapat membiayai anggaran belanja daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab merupakan konsekuensi dari tugas pokok pemerintah, pelaksanaan administrasi keuangan daerah merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintah mengingat perkembangan volume kegiatan yang meningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih memahami dan memenuhi aspirasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pemerintah.

Pemberlakuan Undang-Undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang no. 33 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan Tata Pemerintah dan Hubungan Keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan Anggaran Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *ouput* dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (PP no. 58 tahun 2005). Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun Kebijakan Umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Penyusunan Kebijakan Umum APBD pada dasarnya merupakan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD

dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk mengantisipasi adanya perubahan lingkungan, pemerintah daerah perlu melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Penjangkaran aspirasi masyarakat dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses penganggaran daerah.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004 tersebut membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan dana publik yang didasarkan pada konsep dasar *value for money/performance budgeting system* (anggaran kinerja). Sehubungan dengan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang otonomi dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi di antaranya, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fenomena pembangunan yang berkembang saat ini adalah terjadinya krisis di segala bidang dan adanya tuntutan ekonomi daerah serta korupsi, kolusi dan nepotisme; untuk terselenggaranya suatu pemerintah daerah yang baik sebagai upaya mewujudkan *good governance* yang ditandai adanya tiga pilar utama, yaitu: transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, untuk itu maka perlu adanya penerapan dan pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Agar pemerintah daerah mampu menciptakan kesejahteraan bagi warganya, maka otonomi diberikan hendaknya kondusif bagi pembangunan itu sendiri, otonomi yang berwawasan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat memerlukan adanya pemahaman keterkaitan otonomi tersebut dengan kebutuhan masyarakat. Pemahaman akan kebutuhan masyarakat tersebut akan menjadikan landasan berfikir bagaimana mengoperasikan otonomi tersebut sehingga betul-betul mencapai sasaran yaitu meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah, salah satunya melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat merupakan Dinas Teknis Daerah yang berada di bawah Kementerian Sosial dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang Kesejahteraan Sosial dan melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah di

lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja yang terfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas.

Sardjito dan Muthaher (2007) menemukan pengaruh yang signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada Dinas Pemerintah Karisidenan Semarang, yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 2,054 dengan signifikansi sebesar 0,042 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran maka akan semakin meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah”.

TELAAH LITERATUR

Konsep Anggaran Berbasis Kinerja

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, penganggaran daerah di Indonesia disusun dengan pendekatan kinerja. Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kekurangan yang terdapat dalam pendekatan tradisional, khususnya kekurangan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2005)

Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Noerdiawan (2006:79), tahap-tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut: (a) Penetapan Strategi Organisasi (visi dan misi); (b) Pembuatan Tujuan; (c) Penetapan Aktivitas; dan (d) Evaluasi dan Pengambilan Keputusan.

Dalam menyusun anggaran berdasarkan kinerja, organisasi ataupun unit organisasi tidak hanya diwajibkan menyusun anggaran atas dasar fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja tetapi juga menetapkan kinerja yang ingin dicapai. Kinerja tersebut antara lain dalam bentuk keluaran (*output*) dari kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasil (*outcome*) dari program yang telah ditetapkan. Apabila telah ditetapkan prestasi (kinerja) yang hendak dicapai, baru kemudian dihitung pendanaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran atau hasil yang ditargetkan sesuai rencana kinerja.

Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Menurut Muljarijadi (2006:77), beberapa manfaat yang bisa dirasakan dengan adanya pengukuran kinerja, diantaranya adalah: (a) Akuntabilitas organisasi publik kepada DPRD dan publik lebih mudah dilihat; (b) Lebih memotivasi peningkatan pelayanan kepada publik; (c) Peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah; dan (d) Anggaran kinerja menekankan pada sasaran kinerja dan pencapaian bukan pada pembelian yang dilakukan oleh organisasi.

Anggaran Berbasis Kinerja yang efektif akan mengidentifikasi keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi yang merupakan kunci pengelolaan program secara efektif. Jika terjadi perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat dilakukan evaluasi sumber-sumber *input* dan bagaimana keterkaitannya dengan *output* dan *outcome* untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Siklus Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Mardiasmo (2009:70) siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas: (a) Tahap persiapan (*preparation*); (b) Tahap ratifikasi (*approval/ratification*); (c) Tahap implementasi (*implementation*); dan (d) Tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting and evaluation*).

Untuk dapat menyusun Anggaran Berbasis Kinerja terlebih dahulu harus disusun perencanaan strategik (Renstra). Penyusunan Renstra dilakukan secara obyektif melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan dan masyarakat agar sistem dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan yaitu standar harga, tolok ukur kinerja dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja (tolok ukur) digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Prinsip Penyusunan APBD Berbasis Kinerja

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Berdasarkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2005) prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut: (a) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran; (b) Disiplin Anggaran; (c) Keadilan Anggaran; (d) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran; dan (e) Disusun dengan Pendekatan Kinerja.

Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan rencana kerja dan anggaran. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, dilakukan dengan memerhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan *output* yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan *output* tersebut.

Konsep Kinerja

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, maka penyusunan APBD dilakukan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan masing-masing satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian tercipta sinergi dan rasionalitas yang tinggi dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Hal tersebut juga untuk menghindari duplikasi rencana kerja serta bertujuan untuk meminimalisasi kesenjangan antara target dengan hasil yang dicapai berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi (Bastian, 2001:329).

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objectives*) dengan elemen kunci sebagai berikut: (1) Perencanaan dan penetapan tujuan; (2) Pengembangan ukuran yang relevan; (3) Pelaporan formal atas hasil; dan (4) Penggunaan informasi.

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja organisasi sektor publik menurut Mahmudi (2005:14) adalah sebagai berikut: (1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi; (2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai; (3) Memperbaiki kinerja periode berikutnya; (4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*; (5) Memotivasi pegawai; dan (6) Menciptakan akuntabilitas publik.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan atau program. Dalam pengukuran kinerja diperlukan juga penetapan capaian kinerja, yang dimaksud untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan atau program kebijakan yang telah ditetapkan.

Terlepas dari besar, jenis, sektor atau spesialisasinya setiap organisasi biasanya cenderung untuk tertarik pada penilaian kinerja dalam aspek berikut: (a) Aspek Keuangan (*financial*); (b) Kepuasan Pelanggan; (c) Operasi Bisnis Internal; (d) Kepuasan Pegawai; (e) Kepuasan Komunitas dan *Shareholders/Stakeholders*; dan (f) Waktu.

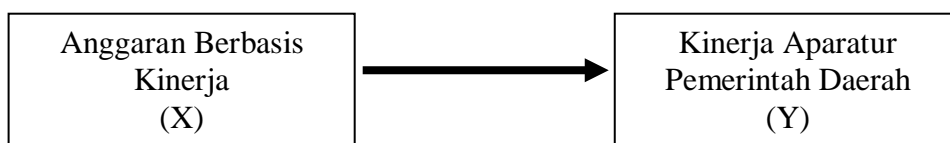
Elemen indikator kinerja menurut Bastian (2001:337) adalah sebagai berikut: (a) Indikator Masukan (*input*) mengukur jumlah sumber daya seperti dana, SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan; (b) Indikator proses (*process*), organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi; (c) Indikator Keluaran (*output*) digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana; (d) Indikator hasil (*outcome*) lebih utama daripada sekedar *output*. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak; dan (e) Indikator manfaat (*benefits*) menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu dan lokasi).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Rancangan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menguji adanya pengaruh antara variabel X dengan variabel Y, dalam penelitian ini yaitu variabel X (anggaran berbasis kinerja) dan variabel Y (kinerja aparatur pemerintah daerah). Penelitian ini merupakan penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

Penelitian ini terdapat variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh anggaran berbasis kinerja sebagai variabel independen terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka desain penelitian sederhana akan digambarkan seperti gambar di bawah ini:



Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan maka diperlukan data dan informasi yang mendukung. Berkaitan dengan keperluan tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu, penelitian secara langsung objek penelitian dengan cara:

- a. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang dihasilkan.
 - b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan dengan cara tanya jawab dengan pejabat dan staf perusahaan yang berwenang mengenai masalah yang diteliti.
- 2) Penelitian Literatur (*Literature Research*) yaitu, penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur, catatan-catatan ilmiah, *website* yang dijadikan landasan teoritis untuk menjawab identifikasi masalah.

Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009:80-81)

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 279 orang. Mempertimbangkan kemungkinan tidak seluruh responden mengembalikan kuesioner hingga batas waktu yang ditetapkan, maka berdasarkan kondisi ini tidak memungkinkan untuk meneliti populasi tersebut. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis mengambil sampel yang dapat mewakili populasi secara tepat. Jumlah sampel yang dapat mewakili populasi secara tepat. Jumlah sampel yang dapat mewakili populasi tergantung besar kecilnya populasi. Dalam menentukan jumlah sampel minimal pada penelitian deskriptif, yaitu dua puluh persen ($\geq 20\%$) dari jumlah populasi (Tuwu, 2003:163).

Penentuan ukuran sampel sebesar 56 orang (20%) dari 279 pegawai pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yang merupakan *nonprobability sampling* dimana teknik penentuan sampelnya dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009:85). Pertimbangan memilih sampel adalah orang-orang yang terlibat dan berkepentingan dalam menyusun anggaran sesuai dengan objek dalam penelitian ini.

Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:38). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Anggaran Berbasis Kinerja (X), yaitu suatu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya.
2. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y), yaitu suatu variabel yang dipengaruhi atau dihasilkan oleh variabel independen.

Indikator Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Anggaran Berbasis Kinerja (X)	a. Persiapan	Ordinal	
	b. Ratifikasi	Ordinal	
	c. Implementasi	Ordinal	
	d. Evaluasi dan Pelaporan	Ordinal	
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y)	a. Efektivitas	Ordinal	<i>Likert</i>
	b. Efisiensi	Ordinal	
	c. Pertumbuhan Pegawai (Kemampuan, Motivasi, Kesempatan berprestasi)	Ordinal	
	d. Kepuasan Pelanggan	Ordinal	

Selanjutnya indikator-indikator tersebut dijalankan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dalam kuesioner. Adapun pernyataan dalam kuesioner untuk Anggaran Berbasis Kinerja dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Variabel	Indikator
Anggaran Berbasis Kinerja (X)	A. Persiapan
	1. Dinas Sosial mempunyai visi yang sudah jelas, mudah diingat serta memberi motivasi kepada anggota organisasi
	2. Dinas Sosial mempunyai misi yang sudah jelas, mudah diingat, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
	3. Dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun Dinas Sosial memiliki tujuan yang sudah jelas, selaras dengan visi misi, menjadi dasar utama pembuatan target dan indikator kinerja pada pelaksanaan aktivitas
	4. Dinas Sosial memiliki informasi finansial tersedia dengan lengkap untuk digunakan sebagai perencanaan anggaran
	5. Rapat penyusunan rencana kinerja anggaran dilaksanakan sebelum penyusunan anggaran Dinas
	B. Ratifikasi
	6. Pengesahan anggaran dilakukan karena anggaran tersebut telah sesuai dengan skala prioritas yang proporsional
	7. Ketepatan waktu pengesahan telah sesuai dengan rencana implementasi anggaran
8. Alasan yang disampaikan pimpinan dalam pengesahan anggaran telah sesuai dengan perencanaan pembuatan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan	
C. Implementasi	
9. Penganggaran di Dinas Sosial telah dilaksanakan secara transparansi	

dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta disusun dengan pendekatan kinerja

10. Penyusunan anggaran di Dinas Sosial telah selaras dengan visi, misi, dan tujuan serta realistis (dapat dicapai) dan menggambarkan hasil (*output* dan *outcome*) serta berdasarkan *value for money*
11. Anggaran Dinas Sosial lebih berorientasi kepada pendayagunaan anggaran yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan
12. Setiap kegiatan atau aktivitas dipilih berdasarkan rencana strategi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan

D. Evaluasi dan Pelaporan

13. Keberhasilan realisasi anggaran telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam hal pencapaian tujuan dinas
14. Realisasi anggaran telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial
15. Sistem anggaran kinerja telah berperan sebagai patokan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran dinas
16. Dalam hal pelaporan anggaran telah sesuai dengan kerangka acuan kegiatan
17. Laporan realisasi anggaran Dinas Sosial telah memberikan gambaran yang jelas atas tingkat keberhasilan, serta mendorong aparatur Dinas Sosial untuk selalu meningkatkan kinerja

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y)

E. Efektivitas

18. Dalam melaksanakan kegiatan setiap aparatur di Dinas Sosial memberikan kinerja yang optimal dengan penggunaan anggaran seminimal mungkin
19. Penggunaan anggaran dilaksanakan oleh setiap seksi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun
20. Setiap kegiatan, program, dan kebijakan dilakukan evaluasi dengan menilai efisiensi biaya
21. Rencana kinerja di Dinas Sosial sudah digunakan sebagai komitmen untuk menyediakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara efisien

F. Efisiensi

22. Penyusunan anggaran telah memperhatikan tingkat pencapaian (*outcome*) yang diharapkan
23. Rencana kinerja anggaran telah disesuaikan dengan Rencana Strategis pada Dinas Sosial
24. Penyusunan anggaran di Dinas Sosial telah memberikan informasi kinerja yang tepat sehingga dapat digunakan untuk melakukan efektivitas dalam implementasi anggaran
25. Setiap kegiatan, program, dan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas untuk menciptakan suatu efektivitas

- G. Pertumbuhan Pegawai (Kemampuan, Motivasi, Kesempatan berprestasi)
26. Penempatan pegawai telah sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki
 27. Pendidikan kinerja pegawai yang meningkat mempengaruhi kemajuan instansi
 28. Secara periodik diadakan pelatihan atau seminar untuk pegawai
 29. Setiap pegawai Dinas Sosial bekerja dengan tekun, rajin dan baik untuk menghasilkan kerja yang berkualitas
 30. Setiap pegawai Dinas Sosial bekerja dengan tekun, rajin dan baik agar memiliki karier yang terus meningkat
 31. Evaluasi prestasi setiap pegawai dilakukan secara berkala
 32. Prestasi pegawai akan berdampak pada kinerja Dinas
 33. Pengembangan kinerja instansi akan dipengaruhi dengan motivasi kerja pegawai
 34. Fasilitas kerja yang disediakan kantor sudah mendukung kelancaran tugas pegawai
 35. Setiap pegawai Dinas Sosial bekerja dengan tekun, rajin dan baik agar mendapatkan promosi jabatan
- H. Kepuasan Pelanggan
36. Pemberian layanan jasa dengan cepat dan tepat sesuai keinginan masyarakat
 37. Tersedianya fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
 38. Kompetensi, kesopanan, dan kredibilitas sebagai pegawai Dinas Sosial sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
 39. Alat ukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan (angket, wawancara, pengaduan) sudah tepat dan sesuai
 40. Jumlah pengaduan masyarakat mengalami penurunan setiap tahunnya

Penyusunan kuesioner menggunakan teknik skala *likert* dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Penggunaan Skala Pengukuran dalam Kuesioner

Notasi	Nilai	Keterangan
Sangat Setuju (SS)	5	Jawaban apabila responden sangat setuju dengan pernyataan dalam kuesioner
Setuju (S)	4	Jawaban apabila responden setuju dengan pernyataan dalam kuesioner
Kurang Setuju (KS)	3	Jawaban apabila responden kurang setuju dengan pernyataan dalam kuesioner

Tidak Setuju (TS)	2	Jawaban apabila responden tidak setuju dengan pernyataan dalam kuesioner
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	Jawaban apabila responden sangat tidak setuju dengan pernyataan dalam kuesioner

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu pernyataan kuesioner yang disebarkan kepada responden, maka kuesioner dikatakan valid jika kuesioner mampu mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi *Rank Spearman*. Dari 17 item pernyataan untuk Anggaran Berbasis Kinerja memiliki nilai-nilai koefisien validitas untuk masing-masing item pernyataan lebih besar dari $r_{kritis} = 0,22$ sehingga dapat dikatakan bahwa item-item pernyataan tersebut adalah valid. Sedangkan dari 23 item pernyataan untuk Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah memiliki nilai-nilai koefisien validitas untuk masing-masing item pernyataan lebih besar dari $r_{kritis} = 0,22$ sehingga dapat dikatakan bahwa item-item pernyataan tersebut adalah valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan metode untuk mengukur suatu jawaban pernyataan, suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode belah dua (*Split Half Method*) *Spearman Brown*. Dalam melakukan uji reliabilitas, penulis menggunakan alat bantu *software* SPSS 19.0 Hasil perhitungan dapat diketahui bahwa reliabilitas untuk Anggaran Berbasis Kinerja sebesar 0,801. Sedangkan reliabilitas untuk Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sebesar 0,854. Karena nilai koefisien reliabilitasnya lebih besar dari 0,7 maka dapat dikatakan bahwa item-item pernyataan tentang Anggaran Berbasis Kinerja dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah adalah reliabel.

Pengujian Hipotesis

Hasil penelitian mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap aparatur pemerintah daerah diperoleh dengan melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan korelasi *Rank Spearman*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penetapan Hipotesis Penelitian

Perumusan H_0 dan H_a adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah

H_a : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah

Dengan kriteria sebagai berikut:

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($df = n-2$) maka H_0 diterima

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($df = n-2$) maka H_0 ditolak

b. Pengujian Statistik

Hasil pengolahan kuesioner dianalisis dengan menggunakan korelasi *Rank Spearman*, yaitu dengan cara masing-masing jawaban diberi bobot nilai dan kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh variabel X dan variabel Y.

Tabel Perhitungan Ranking dan Selisih Ranking

Resp	X	Y	Rank X	Rank Y	d_i (Rank X- Rank Y)	d_i^2
1	70	98	23,5	30,5	-7	49
2	73	98	34	30,5	3,5	12,25
3	75	101	43	43	0	0
4	65	86	5	5	0	0
5	68	92	17,5	16,5	1	1
6	70	101	23,5	43	-19,5	380,25
7	72	92	30	16,5	13,5	182,25
8	75	100	43	40	3	9
9	76	105	48	52	-4	16
10	75	103	43	47	-4	16
11	72	101	30	43	-13	169
12	71	105	26,5	52	-25,5	650,25
13	68	97	17,5	27,5	-10	100
14	64	87	2,5	6,5	-4	16
15	66	89	8,5	9,5	-1	1
16	68	85	17,5	2,5	15	225
17	67	85	11,5	2,5	9	81
18	68	92	17,5	16,5	1	1
19	66	88	8,5	8	0,5	0,25
20	66	89	8,5	9,5	-1	1
21	71	100	26,5	40	-13,5	182,25
22	76	98	48	30,5	17,5	306,25
23	68	90	17,5	11,5	6	36
24	64	90	2,5	11,5	-9	81
25	74	99	38	35,5	2,5	6,25
26	72	96	30	25,5	4,5	20,25
27	76	98	48	30,5	17,5	306,25
28	73	102	34	45	-11	121
29	65	85	5	2,5	2,5	6,25
30	65	87	5	6,5	-1,5	2,25
31	62	85	1	2,5	-1,5	2,25
32	78	99	51,5	35,5	16	256
33	80	103	55	47	8	64
34	81	92	56	16,5	39,5	1560,25
35	73	99	34	35,5	-1,5	2,25
36	73	100	34	40	-6	36
37	68	93	17,5	21,5	-4	16
38	68	92	17,5	16,5	1	1
39	67	92	11,5	16,5	-5	25
40	68	92	17,5	16,5	1	1
41	74	104	38	49,5	-11,5	132,25
42	68	92	17,5	16,5	1	1
43	74	97	38	27,5	10,5	110,25
44	73	99	34	35,5	-1,5	2,25
45	71	103	26,5	47	-20,5	420,25

46	71	96	26,5	25,5	1	1
47	75	94	43	23	20	400
48	75	95	43	24	19	361
49	68	105	17,5	52	-34,5	1190,25
50	75	93	43	21,5	21,5	462,25
51	66	99	8,5	35,5	-27	729
52	75	99	43	35,5	7,5	56,25
53	79	106	53,5	54,5	-1	1
54	79	107	53,5	56	-2,5	6,25
55	77	106	50	54,5	-4,5	20,25
56	78	104	51,5	49,5	2	4
Total						8839

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Nilai Korelasi Variabel X

Nilai yang sama	f(t)	T _x = (t ³ -t)/12
64	2	0,5
65	3	2
66	4	5
67	2	0,5
68	10	82,5
70	4	5
71	4	5
72	3	2
73	5	10
74	3	2
75	7	28
76	3	2
78	2	0,5
79	2	0,5
Jumlah		145,5

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Maka:

$$\sum x^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_x$$

$$\sum x^2 = \frac{56^3 - 56}{12} - 145,5$$

$$\sum x^2 = 14.484,5$$

Nilai Korelasi Variabel Y

Nilai yang sama	f(t)	T _x = (t ³ -t)/12
85	4	5
87	2	0,5
89	2	0,5
90	2	0,5
92	8	42
93	2	0,5
96	2	0,5
97	2	0,5
98	4	5
99	6	17,5
100	3	2
101	3	2
103	3	2
104	2	0,5
105	3	2
106	2	0,5
Jumlah		81,5

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Maka:

$$\sum y^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum T_y$$

$$\sum y^2 = \frac{56^3 - 56}{12} - 81,5$$

Karena terdapat nilai yang sama maka nilai koefisien Korelasi *Rank Spearman* dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d_i^2}{2 \sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

$$r_s = \frac{14.484,5 + 14.548,5 - 8839}{2 \sqrt{(14.484,5)(14.548,5)}}$$

$$r_s = \frac{20.194}{29.032,92946}$$

$$r_s = 0,6956$$

Setelah diketahui besar koefisien korelasi tersebut, untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel X dan variabel Y digunakan pedoman untuk tingkat keeratan hubungan antar kedua variabel berdasarkan interpretasi *Guildford's Empirical Rule* (Sitepu, 1994:108), sebagai berikut:

Tabel Derajat Hubungan Antar Variabel

Internal Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,19	Sangat Rendah
0,20 – 0,39	Rendah
0,40 – 0,59	Sedang
0,60 – 0,79	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

Sumber: Sitepu 1994

Berdasarkan tabel tersebut, maka koefisien korelasi *Rank Spearman* (r_s) sebesar 0,6956 termasuk tingkat hubungan yang kuat yang berada pada daerah 0,60 – 0,79. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang searah yang artinya jika penerapan anggaran berbasis kinerja meningkat, maka kinerja aparatur pemerintah daerah akan meningkat mengindikasikan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja menurun, maka kinerja aparatur pemerintah daerah juga akan menurun.

c. Penetapan Tingkat Signifikan

Untuk menguji hipotesis penelitian maka langkah selanjutnya adalah membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} untuk taraf signifikansi sebesar 5% (0,05) dengan rumus $dk = n - 2$, maka hasilnya sebagai berikut:

$$t = \frac{r_s \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_s^2}} \quad t = \frac{0,6956 \sqrt{56-2}}{\sqrt{1-0,6956^2}} \quad t = \frac{5,111595195}{0,718429286}$$

$$t = 7,1150$$

Dari perhitungan t_{tabel} sebagai berikut:

$$ttabel = t(1-0,95); 56-2$$

$$ttabel = t(0,05); 54$$

$$ttabel = 1,6707$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dengan taraf signifikansi 5% atau taraf kepercayaan 95% didapatkan bahwa $t_{hitung} (7,1150) > t_{tabel} (1,6707)$ maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

d. Perhitungan Koefisien Determinasi

Untuk mencari seberapa besar pengaruh variabel X (anggaran berbasis kinerja) terhadap variabel Y (kinerja aparatur pemerintah daerah) dapat dicari dengan menggunakan rumus koefisien determinasi yang dapat mengetahui nilai yang menyatakan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, hasil perhitungan sebagai berikut:

$$Kd = r_s^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,6956)^2 \times 100\%$$

$$Kd = 48,39\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah sebesar 48,39%, sedangkan sisanya sebesar 51,61% merupakan kontribusi variabel lain selain anggaran berbasis kinerja.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner yang kemudian telah diuji melalui pengujian hipotesis dengan uji statistik yang sesuai serta dengan mempelajari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian, maka dapat dijelaskan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Anggaran Berbasis Kinerja

Apabila total skor jawaban pernyataan Anggaran Berbasis Kinerja dirinci menurut indikator yang ada, maka gambaran atas masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. Persiapan

Pada indikator persiapan, skor yang dapat dicapai adalah sebesar 1180 atau 84,29% dari skor maksimal 1400. Persentase tersebut berada pada kategori

baik, sehingga memberikan gambaran bahwa persiapan anggaran berbasis kinerja di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat telah selaras dengan visi, misi, dan tujuan serta didukung oleh ketersediaan informasi finansial yang lengkap sehingga dapat digunakan sebagai perencanaan anggaran pada dinas tersebut.

b. Ratifikasi

Pada indikator ratifikasi, skor yang dicapai sebesar 697 atau 82,98% dari skor maksimal 840. Persentase tersebut berada pada kategori baik. Sehingga memberikan gambaran bahwa penganggaran berbasis kinerja di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat ditinjau dari indikator ratifikasi telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan anggaran.

c. Implementasi

Pada indikator implementasi, skor yang dapat dicapai adalah sebesar 951 atau 84,91% dari skor maksimal 1120. Persentase tersebut berada pada kategori baik. Sehingga memberikan gambaran bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, serta efisiensi dan efektivitas anggaran. Selain itu implementasi anggaran di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat lebih berorientasi kepada pendayagunaan anggaran yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

d. Laporan dan Evaluasi

Pada indikator laporan dan evaluasi, skor yang dapat dicapai adalah sebesar 1164 atau 83,14% dari skor maksimal 1400. Persentase tersebut berada pada kategori baik, sehingga memberikan gambaran bahwa penganggaran berbasis kinerja dapat digunakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat selain sebagai alat pertanggungjawaban pencapaian kinerja tetapi juga sebagai alat yang dapat memotivasi pegawai di Dinas tersebut untuk bekerja lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Pembahasan mengenai peningkatan setiap indikator kinerja yang dilakukan oleh aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi

Pada indikator efisiensi, skor yang dicapai adalah sebesar 952 atau 85,00% dari skor maksimal 1120. Persentase tersebut berada pada kategori sangat baik, sehingga memberikan gambaran bahwa setiap aparatur pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan program dan kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin dan setiap kegiatan, program, dan kebijakan tersebut dilakukan evaluasi dengan menilai efisiensi biaya sehingga dapat mencegah pemborosan.

b. Efektivitas

Pada indikator efektivitas, skor yang dapat dicapai adalah sebesar 943 atau 84,20% dari skor maksimal 1120. Persentase tersebut berada pada kategori baik. Hal ini menggambarkan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan oleh setiap aparatur telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja setiap aparatur telah berjalan efektif. Untuk lebih jelasnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan program dapat dilihat pada lampiran 11.

c. Pertumbuhan Pegawai

Pada indikator pertumbuhan pegawai yang terdiri dari faktor kemampuan, kesempatan berprestasi dan faktor motivasi, skor yang dapat dicapai adalah sebesar 2340 atau 83,57% dari skor maksimal 2800. Persentase tersebut berada pada kategori baik. Ini menggambarkan bahwa keadaan aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat telah memadai baik segi kualitas maupun kuantitas. Dalam hal meningkatkan kemampuan pegawai, Dinas Sosial mengadakan program sebagai berikut:

1. Penanaman sikap mental, disiplin, dan jiwa korsa
2. Diklat Jabatan Fungsional yang diadakan oleh BKD dan Kementrian
3. Pembekalan peningkatan motivasi kerja yang diadakan oleh PSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat
4. Pembekalan kecerdasan sosial yang diadakan oleh PSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat
5. Pembekalan kewirausahaan PNS Purna Bakti bagi pegawai yang akan pensiun
6. Orientasi CPNS dan PNS yang diadakan oleh BKD dan Pusdik

d. Kepuasan Pelanggan

Pada indikator kepuasan pelanggan skor yang dapat dicapai adalah sebesar 1156 atau 82,57% dari skor maksimal 1400. Persentase tersebut berada pada kategori baik. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas layanan publik terhadap kepuasan masyarakat telah sesuai yang diharapkan, dimana pemberian jasa layanan dilaksanakan dengan tepat dan cepat sesuai dengan keinginan masyarakat, juga didukung oleh fasilitas memadai. Kompetensi (*competency*), kesopanan (*courtesy*), dan kredibilitas (*credibility*) setiap aparatur sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepuasan masyarakat juga dapat dilihat dari berkurangnya jumlah pengaduan dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan jasa terhadap publik telah terpenuhi dengan baik.

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja (X) Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y)

Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y), yaitu sebagai berikut:

Variabel	r_s	t_{hitung}	t_{tabel}	Keputusan	Ket.	Koefisien Determinasi
X dan Y	0,6956	7,1150	1,6707	Ho ditolak	signifikan	48,39%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya hubungan Anggaran Berbasis Kinerja (X) Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y) adalah 0,6956. Hubungan ini termasuk kategori hubungan yang kuat. Hasil pengujian dengan statistik t didapat nilai $t_{hitung} (7,1150) > t_{tabel} (1,6707)$. Hal tersebut mengindikasikan penolakan H_0 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif Anggaran Berbasis Kinerja (X) Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y). Semakin tinggi penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, maka akan semakin tinggi pula Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.

Untuk melihat besarnya pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y) digunakan koefisien determinasi. Hal ini memberikan pengertian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh Anggaran Berbasis Kinerja sebesar 48,39%, sedangkan sisanya 51,61% merupakan kontribusi variabel lain selain Anggaran Berbasis Kinerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, didapat $t_{hitung} > t_{tabel}$. Anggaran berbasis kinerja memiliki hubungan positif yang kuat dan searah, artinya jika anggaran berbasis kinerja diterapkan dengan baik maka efektivitas pengendalian akan meningkat, sebaliknya apabila anggaran berbasis kinerja tidak diterapkan dengan baik maka efektivitas pengendalian tidak akan berjalan dengan baik (lemah). Adapun besarnya pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar 48,39% dan sisanya sebesar 51,61% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini seperti audit internal, pengawasan intern, dan sebagainya.
2. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator: (a) Persiapan anggaran berbasis kinerja di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat telah selaras dengan visi, misi, dan tujuan serta didukung oleh ketersediaan informasi finansial yang lengkap sehingga dapat digunakan sebagai perencanaan anggaran

pada dinas tersebut; (b) Ratifikasi anggaran berbasis kinerja telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan anggaran; (c) Implementasi penganggaran berbasis kinerja di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, serta efisiensi dan efektivitas anggaran. Selain itu implementasi anggaran di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat lebih berorientasi kepada pendayagunaan anggaran yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan; dan (d) Laporan dan Evaluasi penganggaran berbasis kinerja dapat digunakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat selain sebagai alat pertanggungjawaban pencapaian kinerja tetapi juga sebagai alat yang dapat memotivasi pegawai di dinas tersebut untuk bekerja lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Dinas Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator: (a) Efisiensi, setiap aparatur pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan program dan kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin dan setiap kegiatan, program, dan kebijakan tersebut dilakukan evaluasi dengan menilai efisiensi biaya sehingga dapat mencegah pemborosan; (b) Efektivitas, program dan kegiatan yang dijalankan oleh setiap aparatur telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja setiap aparatur telah berjalan efektif; (c) Pertumbuhan Pegawai, keadaan aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat telah memadai baik segi kualitas maupun kuantitas; dan (d) Kepuasan Pelanggan, kualitas layanan publik terhadap kepuasan masyarakat telah sesuai yang diharapkan, dimana pemberian jasa layanan dilaksanakan dengan tepat dan cepat sesuai dengan keinginan masyarakat, juga didukung oleh fasilitas memadai.

SARAN

Gambaran yang akan diperoleh lebih luas lagi mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur bila penelitian dilakukan terhadap beberapa dinas sekaligus atau pemerintah provinsi Jawa Barat atau Kota/Kabupaten lainnya. Karena tingkat pengaruh anggaran berbasis kinerja pada salah satu dinas belum tentu sama dengan tingkat pengaruh anggaran berbasis kinerja pada dinas lainnya.

Diharapkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat hendaknya lebih meningkatkan lagi penerapan anggaran berbasis kinerja, karena peningkatan penerapan anggaran berbasis kinerja ini dapat digunakan sebagai alat bantu bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk mencapai efektivitas pengendalian, juga terus meningkatkan lagi kualitas pelayanan dan anggaran yang direncanakan lebih mengarah pada masyarakat luas agar masyarakat merasa lebih puas dengan pelayanan yang telah diberikan.

Untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas pemilihan variabel lain agar diperoleh gambaran mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah daerah guna mendorong terwujudnya *good governance*, serta menambah variabel lain yang ikut mempengaruhi efektivitas pengendalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2005. *Pedoman penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3. Jakarta, Indonesia.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muljarjadi, Bagdja. 2006. *Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, Jurnal Governance (Sinergi Masyarakat, Swasta, dan Pemerintah yang Berkeadilan)*, Vol. 2. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noerdiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sardjito, Bambang dan Muthaher, Osmad. 2007. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Sitepu, Nirwanan SK. 1994. *Analisis Korelasi*. Unit Pelayanan Statistika Jurusan Statistika UNPAD Bandung.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tuwu, Alimmudin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI-Press.

Lampiran 1 - Penggunaan SPSS dalam Perhitungan Variabel X

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	56	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	56	100.0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.801	17

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
pert1	66.95	19.033	.446	.562	.787
pert2	67.16	19.592	.413	.529	.790
pert3	67.21	18.899	.342	.623	.796
pert4	67.14	18.670	.536	.630	.781
pert5	67.11	19.806	.329	.421	.795
pert6	67.09	19.356	.362	.543	.793
pert7	67.27	19.800	.335	.409	.795
pert8	67.21	18.462	.463	.404	.786
pert9	67.04	19.053	.405	.688	.790
pert10	67.18	20.004	.323	.428	.795
pert11	66.98	19.072	.483	.782	.785
pert12	67.18	19.531	.497	.577	.787
pert13	67.14	18.706	.409	.517	.790
pert14	67.23	19.381	.403	.555	.790
pert15	67.20	19.688	.290	.344	.798
pert16	67.18	19.386	.399	.510	.791
pert17	67.16	19.919	.273	.450	.799

Lampiran 2 - Penggunaan SPSS dalam Perhitungan Variabel Y

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	56	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	56	100.0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.854	23

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
pert18	91.86	37.579	.323	.	.852
pert19	91.91	37.719	.349	.	.851
pert20	91.93	37.122	.365	.	.850
pert21	91.95	38.015	.315	.	.852
pert22	91.98	36.018	.468	.	.846
pert23	91.91	35.283	.635	.	.840
pert24	92.09	37.901	.253	.	.854
pert25	91.93	37.013	.381	.	.850
pert26	91.98	36.127	.453	.	.847
pert27	91.98	37.509	.329	.	.851
pert28	91.96	36.399	.409	.	.849
pert29	91.84	36.028	.563	.	.843
pert30	91.95	36.343	.572	.	.844
pert31	91.96	38.108	.348	.	.851
pert32	91.96	37.962	.335	.	.851
pert33	92.00	35.673	.498	.	.845
pert34	92.07	36.686	.452	.	.847
pert35	92.11	36.861	.312	.	.853
pert36	91.98	37.218	.348	.	.851
pert37	92.00	35.636	.598	.	.842

pert38	92.04	36.726	.396	.	.849
pert39	92.07	36.286	.481	.	.846
pert40	92.07	36.940	.412	.	.849

Lampiran 3 - Penggunaan SPSS dalam Perhitungan Hubungan Variabel X dan Y

Correlations

			Anggaran_ Berbasis_Kinerja	Kinerja_Aparatur_ Pemerintah_Daerah
Spearman's rho	Anggaran_Berbasis_Kinerja	Correlation Coefficient	1,000	,223
		Sig. (2-tailed)	.	,390
		N	17	17
Kinerja_Aparatur_ Pemerintah_Daerah	Kinerja_Aparatur_ Pemerintah_Daerah	Correlation Coefficient	,223	1,000
		Sig. (2-tailed)	,390	.
		N	17	23

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	1,000
		N of Items	1 ^a
	Part 2	Value	1,000
		N of Items	1 ^b
	Total N of Items		2
Correlation Between Forms			,355
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		,524
	Unequal Length		,524
Guttman Split-Half Coefficient			,518

a. The items are: Anggaran_Berbasis_Kinerja

b. The items are: Kinerja_Aparatur_Pemerintah_Daerah